

PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KESERASIAN ALOKASI BELANJA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

**Firda Rizky Amalia
Ida Bagus Putu Purbadharmaja**

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

ABSTRAK

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diprosikan dengan indeks pembangunan manusia. Dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan dalam membiayai pembangunan di daerahnya sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun kenyataannya, adanya peningkatan PAD belum tentu meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini disebabkan karena belanja publik yang relatif rendah menyebabkan pelayanan publik yang tidak memadai bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja terhadap IPM di kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Biro Keuangan Provinsi Bali yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan dan regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Bali secara rata-rata sebesar 24,38 persen, sedangkan rata-rata alokasi dana untuk belanja publik sebesar 41,43 persen. Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh signifikan terhadap IPM, Secara parsial, kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

***Kata kunci:** Kemandirian Keuangan Daerah, Keserasian Alokasi Belanja, dan Indeks Pembangunan Manusia*

ABSTRACT

Regional autonomy aimed to improve the welfare of the people which showed in Human Development Index (HDI). As the Local Revenue (LR) increased, the local government could finance its own development in the area which will automatically improve the welfare of its society. But in reality, the increase in revenue was not necessarily improving human development. This showed as a result of relatively low public expenses that brought to inadequate public services for the community. This study was aimed to determine the influence of local financial autonomy and allocation of expenditure evenness on HDI in Balinese districts/cities from the year 2008 until 2014. This study used secondary data obtained from monetary department of Balinese Province which then analyzed with financial ratio analysis and multiple linear regression analysis. The analysis showed that the level of financial independence in Balinese districts/ cities was in an average of 24.38 percent while the average allocation of funds for public expenditure was in an average of 41.43 percent. The result of multiple linear regression analysis showed that simultaneously financial independence and allocation of expenditure evenness had significant effect on HDI, partially the local financial independence and expenditure allocation evenness had positive and significant impact on the HDI.

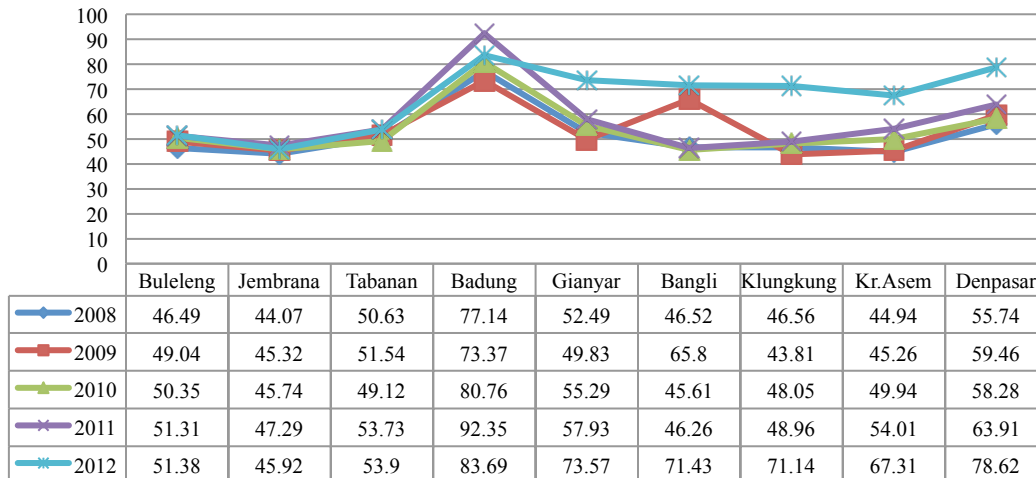
***Keywords:** Regional Financial Independence, Allocation Expenditure Evenness and Human Development Index*

PENDAHULUAN

Tujuan utama dari otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan. Kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayahnya. Paradigma pembangunan menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan peningkatan pendidikan

(Wijanarko,2012). Peningkatan pembangunan manusia tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat. Gambar 2 menunjukkan perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2012 :

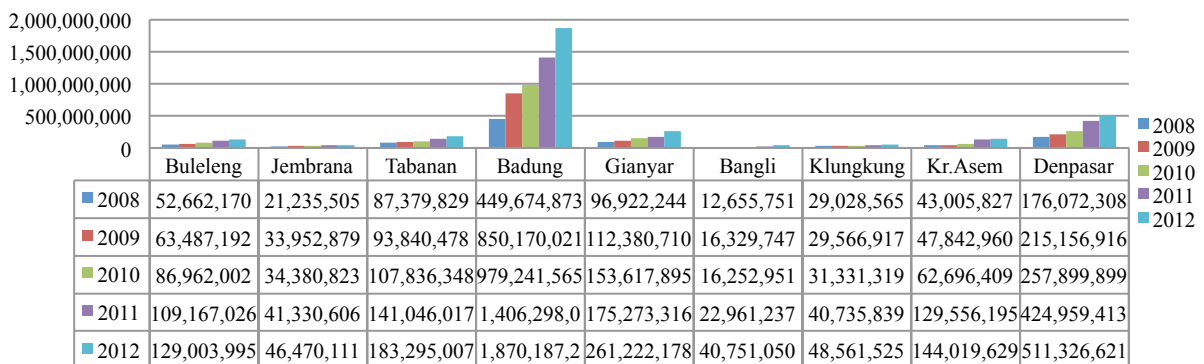
Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2012 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Bali.2013

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga memungkinkan kemandirian keuangan daerah bagi daerah kabupaten/kota. Dengan terciptanya kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah akan mampu membiayai pembangunan daerahnya. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini sangat menentukan kemandirian keuangan daerah. Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2012 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2012 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Bali, 2013

Berdasarkan pada Gambar 1. menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Periode 2008-2012 pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Namun, jika dilihat dari kabupaten/kota, terdapat ketimpangan pendapatan Kabupaten

Badung dengan lainnya. Pamudji dalam Kaho (1998: 124) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.

Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kehidupan demokrasi yang semakin maju, adanya rasa keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi secara vertikal antar pusat dan daerah serta hubungan horizontal antar daerah. Pandangan itu sesungguhnya sejalan dengan arah kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan dalam rangka otonomi daerah (Gozali et al., 2001). Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan sebagaimana dikatakan Musgrave, peran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu peranan dalam alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dalam mewujudkan peran tersebut, salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan adalah dalam bidang pengalokasian dana atau anggaran pembangunan ke bidang yang berkaitan dengan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, irigasi, transportasi dan sebagainya (Sasana, 2009).

Pengeluaran sektor publik berkaitan dengan pembangunan manusia. Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam pembangunan manusia (Sahrah, 2007). Anggaran dalam pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka melek huruf. Anggaran dalam bidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga akan terjadi efisiensi dan pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi riil per kapita (Delavallade, 2006). Mencermati alokasi pengeluaran pemerintah terhadap akses publik, masih relatif tingginya alokasi anggaran belanja rutin dibandingkan dengan anggaran belanja pembangunan baik dalam skala nasional maupun regional (Suparto, 2005). Pengeluaran pada sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan pada suatu daerah (Astri, 2013). Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan pembangunan di daerahnya dengan mengoptimalkan sumber penerimaan daerah sehingga mencukupi kebutuhan pembiayaan di sektor publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali Periode 2008-2012
- 2) Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten di Provinsi Bali Periode 2008-2012
- 3) Untuk mengetahui pengaruh tingkat keserasian alokasi belanja secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten di Provinsi Bali Periode 2008-2012

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan obyek penelitiannya adalah kemandirian keuangan daerah, keserasian alokasi belanja dan indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2012.

Jenis dan Sumber Data

Data-data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja serta regresi linear berganda. Variabel kemandirian keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan PAD dengan total pengeluaran daerah. Variabel keserasian alokasi belanja diperoleh dengan membandingkan belanja publik dengan total pengeluaran daerah dimana belanja publik yang dimaksud adalah belanja yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan.

Persamaan regresi linear berganda dituliskan dalam persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- Y = Indeks Pembangunan Manusia periode 2008-2012
- X₁ = Kemandirian Keuangan Daerah periode 2008-2012
- X₂ = Keserasian Alokasi Belanja periode 2008-2012
- α = Konstanta
- β₁, β₂ = Koefisien Regresi
- e = Kesalahan pengganggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007). Kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008–2012 dapat dilihat pada Tabel 1. Secara rata-rata, kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Kabupaten Badung memiliki kemandirian yang paling besar yaitu rata-rata 89,86 yang berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (pemerintah pusat dan provinsi) rendah. Sedangkan Kabupaten Jembrana memiliki kemandirian yang paling kecil yaitu rata-rata 6,96 yang berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern tinggi.

Tabel 1. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008 – 2012 (Persen)

No	Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Buleleng	7,36	8,21	10,38	10,52	15,53	10,40
2	Jembrana	4,77	3,78	6,93	7,56	11,77	6,96
3	Tabanan	13,54	13,33	15,10	15,98	25,17	16,62
4	Badung	70,70	59,48	74,23	97,31	147,60	89,86
5	Gianyar	15,40	15,89	20,36	25,01	37,43	22,82
6	Bangli	5,16	42,54	3,45	3,99	10,30	13,09
7	Klungkung	7,18	6,58	7,09	8,24	11,94	8,21
8	Karangasem	7,13	7,26	9,53	16,17	24,03	12,82
9	Denpasar	26,73	27,24	27,75	38,63	73,00	38,67
	Ratarata	17,55	20,48	19,42	24,82	39,64	24,38

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, 2014 (diolah)

Keserasian Alokasi Belanja Publik

Tabel 2. Keserasian Alokasi Belanja Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008 – 2012 (Persen)

No	Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Buleleng	30,45	53,93	56,23	66,07	61,39	53,61
2	Jembrana	18,23	37,67	24,54	38,17	29,65	29,65
3	Tabanan	41,38	52,65	15,77	61,95	57,01	45,75
4	Badung	12,03	33,76	32,21	30,22	30,89	27,82
5	Gianyar	51,54	19,14	54,57	57,48	53,03	47,15
6	Bangli	43,18	45,59	42,8	47	45,78	44,87
7	Klungkung	32,15	5,01	49,22	52,9	52,33	38,32
8	Karangasem	14,48	17,31	56,46	64,07	55,92	41,65
9	Denpasar	23,41	61,88	45,85	46,79	42,07	44,00
	Rata-rata	29,65	36,33	41,96	51,63	47,56	41,43

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan RI, 2014 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2. dapat diketahui bahwa rata-rata alokasi dana untuk belanja publik pada kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2012 adalah 41,43 persen. Presentase rata-rata alokasi dana untuk belanja publik yang paling kecil dimiliki oleh Kabupaten Jembrana, sedangkan yang tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Gianyar. Dengan berjalannya waktu, alokasi dana untuk belanja publik pada kabupaten/kota di Provinsi Bali secara rata-rata mengalami peningkatan. Dari 29,65 persen pada tahun 2008 menjadi 41,43 persen pada tahun 2012.

Hasil Regresi Linear Berganda

$$\hat{Y} = 39,537 + 0,501 X_1 + 0,155 X_2 \dots\dots\dots (2)$$

$$Se = (2,814) \quad (0,041) \quad (0,057)$$

$$t = (14,048) \quad (12,229) \quad (2,692)$$

$$Sig = (0,000) \quad (0,000) \quad (0,010)$$

$$R^2 = 0,781 \quad F = 74,391$$

Berdasarkan hasil uji statistik F, menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 74,391 dengan nilai sig. $F_{hitung} = 0,000 < \alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2012. Kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi bilamana pemerintah daerah mampu menyediakan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengelola keuangan daerahnya dengan baik sehingga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.

Menurut Sidik (2002) pemerintah daerah diharapkan terus berusaha dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan alokasi belanja terutama alokasi belanja publik yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Tukiran (2010) menyatakan bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda sehingga dalam pengalokasian anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pembangunan manusia di suatu daerah tidak terlepas dari besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan daerahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayahwati (2011) bahwa kemandirian fiskal berpengaruh signifikan terhadap indeks

pembangunan manusia. Disamping itu juga Adi (2006) dalam penelitiannya membuktikan bahwa alokasi belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang mana nantinya mendorong produktifitas masyarakat sehingga pendapatan meningkat dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Variabel Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) menunjukkan nilai $t_{hitung}(12,229) > t_{tabel}(1,684)$ dengan $sig. thitung = 0,000 < \alpha = 0,05$ berarti bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2008) yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan kemandirian keuangan daerah yang tinggi berarti bahwa daerah mampu memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri tanpa bantuan dan campur tangan pemerintah pusat sehingga pembangunan daerah dapat berjalan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Dengan adanya peningkatan kemandirian keuangan daerah akan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Kemandirian keuangan daerah tidak terlepas dari peran PAD dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan adanya peningkatan PAD maka ketergantungan terhadap bantuan ekstern dapat dikurangi sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Enceng (2012) menyatakan rendahnya kemandirian keuangan daerah disebabkan minimnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan PAD. Tingkat kemandirian fiskal menurun karena adanya peningkatan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan di daerah sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik terjamin (Sriyana, 2011).

Variabel Keserasian Alokasi Belanja (KAB) menunjukkan hasil nilai $t_{hitung} 2,692 > t_{tabel} 1,684$ dengan nilai $sig. thitung 0,010 < \alpha = 0,05$ yang berarti bahwa keserasian alokasi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astri (2013) dimana alokasi belanja di bidang kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan. Begitu juga dengan hasil peneltian yang dilakukan oleh Sasana (2012) dimana belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

Astri (2013) menyatakan dalam hal peningkatan pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang baik dapat terpenuhi melalui alokasi belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi belanja pemerintah di sektor tersebut maka dapat meningkatkan produktivitas pasyarakat sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia.

Hasil Asumsi Klasik

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Uji Asumsi Klasik

Normalitas	Multikolinearitas		Autokorelasi	Heteroskedastisitas
	Tol	VIF		
0,651	X ₁ :0,970	X ₁ :1,031	0,548	X ₁ : 0,603
	X ₂ :0,970	X ₂ :1,031		X ₂ :0,864

Sumber: Olah Data

Berdasarkan pada Tabel 3, hasil uji normalitas Kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dimana nilai signifikansi sebesar 0,651 lebih besar dari 0,05. Pada pengujian multikolinearitas, nilai *tolerance* untuk setiap variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas. Hasil uji *Glejser* dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas dan nilai pada uji *Runs* dengan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,548 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Berdasarkan pada hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dalam artian jika kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja meningkat, maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/ kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Berdasarkan pada hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Keserasian alokasi belanja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja pemerintah dalam pelayanan publik terutama di bidang kesehatan dan pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Saran

Upaya pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk meningkatkan sumber PAD adalah baik untuk kemandirian fiskal daerah, namun diharapkan agar memperhatikan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang disertai dengan upaya pemerataan pendapatan sehingga manfaat peningkatan PAD dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah. Disamping itu, bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali agar mencermati anggaran pengeluaran rutin yang lebih efisien sehingga proporsi pelayanan publik dapat ditingkatkan

REFERENSI

- Astri, Meylina et al.2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis Vol 1, No.1.UNJ. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Bali Dalam Angka Tahun 2012*. Bali.
- Enceng, Liestyodono et al. 2012. *Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah*. Jurnal. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. FISIP. Universitas Terbuka. Banten.
- Gozali, A. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Birokrasi Ekonomi Sosial*. Pattimura,L. [editor]. Pustaka LSKPI, Jakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta
- Kaho, Yosef Riwu, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta

- Pambudi, Septian Bagus. 2008. *Analisis Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat*. Jurnal. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Sahrah, Alimatus. 2007. *Memberdayakan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Bangsa*. Pidato Dies Natalis Unwama ke XXI, Yogyakarta.
- Sasana, Hadi. 2009. *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Terakreditasi. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 10 No.1, Juni 2009: 103-124.
- Sidik, Machfud, 2001. *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip, Pelaksanaan di Berbagai Negara, serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah*. Batam : Sidang Pleno X ISEI
- Sriyana, Jaka. 2011. *Disparitas Fiskal Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Tukiran, dan Beryl Artesian. 2010. *Alokasi Anggaran Daerah Dalam Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2001-2009* Jurnal. UGM. Yogyakarta
- Wijanarko, Andri et al. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan PDRB PerKapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Pulau Madura Tahun 2002-2011*. Jurnal. Jawa Timur.